

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z., 2019. *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-11. Sinar Grafika, Jakarta.
- Butar-Butar, E.N., 2018, *Metode Penelitian Hukum*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Creswell, J.W., & J. David Creswell, J.D., 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*. Fifth edition. SAGE Publications, Los Angeles.
- Diantha, I.M.P., 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, cetakan ke-3. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Fuady, M., 2002, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporation law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Penerbit PT Aditya: Bandung.
- Hamzah, A., 1986. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mantili, R., & Afriana, A., 2015, *Hukum Acara Perdata*. CV Kalam Media, Bandung.
- Mathew B. Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J., 2014, *Qualitative Data Analysis: A Methods Soorcebook*. Edition 3. SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks.
- Mujiburohman, D.A., 2022. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, STPN Press*, Yogyakarta.
- Munaf, Y. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S., 2022, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-21. Rajawali Press, Jakarta.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, Jakarta.
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit Alfabeta, Jakarta.
- Sugiarto, Umar Said, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Malang.
- Suny, Ismail. 1982, *Pembagian Kekuasaan Negara*. Penerbit Aksara Baru, Jakarta.
- Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Ichtiar: Jakarta.
- Unit Riset Publikasi-Universitas Gadjah Mada, 2024, *Hukum Administrasi Negara (Konsep, Fundamental, Perkembangan Kontemporer, dan Kasus)*, Penerbit PT Rajagrafinso Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077)

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601)

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/3/2012 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*).

C. Jurnal, Disertasi, Artikel Majalah, dan Tesis

Agustina, S. 2015. Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Sistem Peradilan Pidana. *MMH*, 44(4), 503-510.

Amirillis, Puteri Anggun. (2021). “Urgensi Kejelasan Rumusan Mengenai Kementerian/Lembaga yang Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Yudisial*, Vol 14, No 2, Agustus. 165

- Ambarwati, D.L. (2021). Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana. Dapat diunduh dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html>
- Ardisasmita, Sy. (2006). Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcemkent untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Dapat diunduh pada <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf>.
- Cahyady, Y. (2021). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 165–177. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1232>
- Djarmiko, A.A., Sanjaya, R., Hidayati, R.K. (2022). Dampak Yuridis Anomali Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(8), 1-11.
- DS, 2021, Perdata Tunda Pidana atau Pidana Tunda Perdata, KlikLegal.com, 20 September 2021. Dapat diunduh pada <https://kliklegal.com/perdata-tunda-pidana-atau-pidana-tunda-perdata/>.
- Fauzani, M. A., & Rohman, F. N. (2020). Problematik Penyelesaian Sengketa Pembuatan Melawan HUKUM oleh Penguasa di Peradilan Administrasi Indonesia. *Widya Pranata Hukum*, 2(1), 19–39.
- Gun, 2010, “Konsekuensi Hukum Pemeriksa (-an),” editorial pada Majalah *Pemeriksa*, edisi 121.
- Kelik Iswandi, Nanik Prasetyoningsih (2020). Kedudukan *State Auxiliary Organ* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Volume 1 Nomor 2.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, *Sejarah Pengadilan*, <https://ptun-jakarta.go.id/page/sejarah-pengadilan>.
- Maksum, Hairul, 2020, “Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang Melibatkan Badan Negara atau Pejabat Pemerintah.” *Juridica, Volume 2, Nomor 1*.
- Maya, A., & W, K.A. (2021). Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan ganesha, Program Studi Ilmu Hukum*, 4(3), 990-996.
- Musa, A. N. (2015). Kajian Hukum Atas Opini BPK RI Terhadap Laporan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah. *Lex et*

Societatis, III(2), 79–87.

Nafiatul Munawaroh, 7 Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/7-asas-hukum-acara-peradilan-tata-usaha-negara-lt62d5370e455c4/>

Nasarudin, T. M. (2020). Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Sebagai Lembaga Negara Di Bidang Pengawasan Keuangan Negara. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 78–92. <https://doi.org/10.24967/jcs.v5i1.482>

Nasution, B.J. (2008). Tinjauan tentang Ruang Lingkup dan Alat Ukur Tindak Pemerintahan yang Baik. *Demokrasi*, 5(2), 123-128.

Putri, Nila Eka, 2020, Pemanfaatan SAI PMF, Wujud Semangat BPK Dalam Memberi Nilai dan Manfaat Bagi Masyarakat. *Warta Pemeriksa*. Edisi 8 Volume III. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional BPK.

Ramlan, 2010, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.

Simamora, Janpatar, 2014, Tafsir Negara Hukum Dalam Prespektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14 (3).

Sunarto, 2016, Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 45 (2).

Tim Editorial Biro Humas BPK, 2022, “Menghadapi Gugatan dengan LHP yang Berkualitas,” *Warta Pemeriksa Edisi 3, Volume V*, Jakarta.

Utama, Y.J. (n.a). “*Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara*”. Dapat diunduh pada <https://repository.ut.ac.id/3974/1/ADPU4332-M1.pdf>.

Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani. 2016. Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Budaya*, 18.